

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN POPULASI TERNAK DI
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017**

Oleh : Sapta Sukmana

Email : saptasukmana96@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

abstract

The main essence of policy implementation is understanding what should happen after a program is declared valid or formulated. This understanding includes efforts to administer it and have a real impact on the community or events. Then the implementation of the policy can be interpreted as the implementation of activities or activities referring to the guidelines that have been implemented can have an impact or impact on the community and can contribute in overcoming the problems that are targeted by the program.

This study aims to understand the Implementation of Policy for the Acceleration of Cattle and Buffalo Populations in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency in 2017. Theoretical Framework uses Policy Implementation According to Merrile S. Grindle, namely Policy Content and Policy Context. This research was conducted in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. Data collection techniques are done by interview and documentation. The method used in this research is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that in its implementation in the Rokan Hilir Regency precisely in the Bagan Sinembah District has not been going well. Because cow self-sufficiency has only been running for 1 to 2 years so there is no evaluation from the government what are the factors that hamper this self-sufficiency in cattle. Rokan Hilir Regency still lacks Human resources, namely lack of veterinarians. With a livestock population in Rokan Hilir, around 20,000, the Rokan Hilir District has only 7 veterinarians, which is not yet commensurate with the livestock population. Government institutions that function as coaches, supervisors, researchers and implementers of education, training and counseling have not functioned properly in managing the institutional breeders for the development of the cattle self-sufficiency.

Keywords: *Implementation, Policy, Population*

PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten yang berasal dari pemekaran kabupaten Bengkalis. Sejak 4 Oktober 1999 di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan di Bagansiapi-api sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Visi Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 adalah ***“Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing Tahun 2016”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir menuangkan kedalam 5 Misi diantaranya adalah :

1. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sektor pertanian, industri, dan jasa.
3. Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan berwibawa.

5. Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa.

Visi dan misinya sama dan sejalan dengan visi misi Kabupaten Rokan Hilir yang pada kenyataannya belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak nya jalan-jalan yang ada di setiap daerah masih banyak yang rusak sebagai sarana transportasi, yang mana transportasi tersebut sebagai penggerak perekonomian rakyat khusus nya di Kecamatan Bagan Sinembah. Sumber daya alam di Kecamatan Bagan Sinembah sebenarnya cukup baik terutama sektor peternakan sapi, tapi Pemerintah belum mampu mengembangkan sektor peternakan sapi tersebut menjadikan Rokan Hilir sebagi sentra sapi di Provinsi Riau.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk : (i) mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan; (ii) memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat; (iii) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat; (iv) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan (Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Dyah ratih Sulistyastuti, M.Si, 2015:64).

Kementerian Pertanian telah meluncurkan Program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sejak tahun 2016, namun Kabupaten Rokan Hilir sendiri baru menjalankan program tersebut tahun 2017. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi UPSUS SIWAB kepada seluruh kelompok ternak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan memberikan pemahaman program UPSUS SIWAB kepada masyarakat, UPSUS SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan suatu Kecamatan di Rokan Hilir yang memiliki populasi sapi yang merata di Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan suatu langkah yang tepat bagi Pemerintah Rokan Hilir dalam melaksanakan suatu program Pengembangan swasembada sapi untuk dapat memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Rokan Hilir. Tetapi sejauh ini belum ada suatu kebijakan yang pasti dari pemerintah supaya populasi ternak sapi yang cukup banyak di Kecamatan Bagan Sinembah dapat bertambah atau bahkan menjadi sentra daerah populasi ternak sapi di Provinsi Riau.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “ tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi dari Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah Provinsi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting pada pasal 1 ayat 1 yakni “ upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting yang selanjutnya di sebut Upsus Siwab adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan.”

Beberapa fenomena yang di Kabupaten Rokan Hilir dalam

pengembangan swasembada sapi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Belum Memadai

Di Rokan Hilir ini kekurangan sumber daya manusia yaitu kekurangan dokter hewan dengan populasi ternak sapi sekitar

20.000 sementara dokter hewan di Rokan Hilir berjumlah 7 orang. Jadi intinya sumber daya manusia belum memadai.

Tabel 1.1
Petugas Medik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama	Jabatan	Lokasi Penugasan
1	Drh. Dodi Mukhtar	Medik Veteriner	Kecamatan Bangko Kecamatan Sinaboi
2	Drh. Khairiah	Medik Veteriner	Kecamatan Rimba Melintang Kecamatan Batu Hampar
3	Drh. Ogi Perdiansyah	Medik Veteriner	Kecamatan Tanjung Medan Kecamatan Pujud
4	Drh. Lisnawati S.	Medik Veteriner	Kecamatan Bagan Sinembah Raya
5	Drh. Zulinarti	Medik Veteriner	Kecamatan Bagan Sinembah
6	Drh. Abdul Rajab	Medik Veteriner	Kecamatan Simpang Kanan
7	Drh. Rahmat Hidayat	Medik Veteriner	Kecamatan Tanah Putih

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa petugas medik atau dokter hewan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah hanya 7 orang. Idealnya Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki 18 Kecamatan seharusnya masing-masing Kecamatan memiliki minimal satu orang dokter hewan yang bertugas di daerah tersebut. Karena apabila para peternak yang ingin berkonsultasi atau mengobati hewan mereka yang sakit akan mudah terjangkau. Tetapi kenyataan di lapangan dokter hewan hanya berjumlah 7 orang sehingga ada 4 orang dokter hewan yang harus

menempati dua lokasi penugasan sekaligus, ini akan berdampak juga kepada para peternak yang daerahnya tidak memiliki dokter hewan sehingga para peternak akan sulit apabila ada ternak mereka yang sedang sakit atau ternak yang membutuhkan obat. Apabila masing-masing kecamatan mempunyai dokter hewan maka akan lebih mudah terjangkau bagi para kelompok ternak.

2. Terjadi penurunan tingkat populasi ternak sapi dari tahun 2017 ke tahun 2018

Pada tahun 2017 jumlah populasi ternak di Kabupaten

Rokan Hilir berjumlah 20. 254 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat) Sedangkat tingkat populasi sapi di Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berjumlah 18.161 (delapan belas ribu seratus enam puluh satu).

3. Terbatasnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

Penyuluhan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan peternakan yang senantiasa bersama dengan peternak. Peran penyuluh sebagai mediator informasi teknologi kepada peternak sangat penting artinya bagi peternak dalam mengadopsi teknologi yang senantiasa terus berkembang. Berdasarkan data di lapangan bahwa pembinaan terhadap

peternak di Rokan Hilir terutama di Kecamatan Bagan Sinembah cukup memadai, yaitu penyuluh selalu melakukan penyuluhan kepada kelompok ternak. Tenaga penyuluh selalu mengunjungi para peternak untuk menyampaikan informasi teknologi budidaya ternak. Selain itu, penyuluh juga ikut membantu melakukan pemecahan berbagai masalah yang di hadapi oleh peternak dan kegiatan usaha nya. Penyuluh juga bertugas memberikan dorongan kepada para peternak dan petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin maju.

Tabel 1.2
Petugas Paramedik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama	Jabatan	Lokasi Penugasan
1	Amrizal, S.Pt	Paramedik Veteriner	Kecamatan Rimba Melintang Kecamatan Bangko Pusako
2	Musliadi, S.pt	Paramedik Veteriner	Kecamatan Tanah Putih Kecamatan Tanjung Melawan
3	Imran Suherman	Paramedik Veteriner	Kecamatan Kubu Kecamatan Kubu Babussalam
4	Nurmayulis	Paramedik Veteriner	Kecamatan Kubu
5	Nia Maya Sari, S.Pt	Paramedik Veteriner	Kecamatan Bangko Kecamatan Sinaboi
6	Roby Alendra	Paramedik Veteriner	Kecamatan Tanjung Medan Kecamatan Pujud
7	Salman	Paramedik Veteriner	Kecamatan Pekaitan
8	Jhon Feri Sianipar	Paramedik Veteriner	Kecamatan Simpang Kanan
9	Sutarno	Paramedik Veteriner	Kecamatan Batu Hampar
10	Rawali Paulus Capah	Paramedik Veteriner	Kecamatan Bagan Sinembah

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Sama halnya dengan dokter hewan, Kabupaten Rokan Hilir juga kekurangan petugas paramedik atau petugas penyuluh lapangan. Kabupaten Rokan Hilir hanya mempunyai 10 orang petugas penyuluh lapangan yang sudah mempunyai lokasi penugasan. Sama dengan dokter hewan seharusnya petugas penyuluh lapangan juga harus ditempatkan di setiap Kecamatan agar para petugas lapangan tersebut dapat mensosialisasikan berbagai permasalahan para kelompok ternak dengan baik. Tetapi apabila satu orang petugas penyuluh lapangan menempati dua lokasi penugasan maka akan semakin berat tugas penyuluh lapangan dan juga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menjangkau dua daerah tersebut untuk bersosialisasi

atau menyampaikan bantuan kepada kelompok ternak.

Sejauh ini langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hanya membuat beberapa program terkait pelaksanaan pengembangan swasembada sapi. Hanya saja untuk melaksanakan program tersebut haruslah di dukung oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan swasembada sapi. Dalam pelaksanaannya hanya lah beberapa program saja yang di jalankan dan selebihnya hanya menjadi sebuah formalitas yang belum terlaksana.

Berikut ini di jelaskan beberapa bantuan yang telah di salurkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada seluruh kelompok ternak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kelompok Tani Penerima Bantuan Sapi Dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016

No	Kelompok Ternak	Bantuan
1	Sepakat Bersama	Pembuatan Kandang Sapi
2	Perintis, Terta Jaya, Lestari, Makmur, Kelompok III, Sapta Sentosa, Sumber Usaha, Sejahtera, Bima, Mekar Jaya, Anyelir	25 Ekor Sapi Brahman Cross
3	Mekar Sari	Sapi Jantan 1 Ekor Sapi Betina 6 Ekor
4	Karya Abadi	Sapi Jantan 1 Ekor Sapi Betina 9 Ekor
5	Suka Tani	Sapi Jantan 2 Ekor Sapi Betina 17 Ekor Rumah Kompos 1 Unit Kendaraan Roda Tiga 1 Unit
6	Kampung Baru Sejahtera, Tunas Baru	Sapi Jantan 1 Ekor Sapi Betina 9 Ekor Rumah Kompos 1 Unit Kendaraan Roda Tiga 1 Unit

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga membuat berbagai program dalam melaksanakan percepatan populasi ternak sapi tersebut. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak yang nantinya akan menjadi jaminan pasokan sumber protein dan tingkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat Rokan hilir. Upaya ini dilakukan dengan menjalankan program pemberian bantuan bibit ternak bagi kelompok-kelompok peternak. selain program bantuan bibit ternak terdapat juga berbagai bantuan yang lain yang telah di buat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Di harapkan agar program

yang telah di buat dapat di laksanakan dengan baik oleh pihak yang terkait dan dapat tercapai pula tujuannya.

Berikut ini di jelaskan populasi ternak sapi di setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2017 sebagi berikut :

Tabel 1.4
Data Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Populasi Daerah Ternak Sapi Potong Di Setiap Kecamatan :

No	Kecamatan	Sapi Jantan	Sapi Betina	Jumlah
1	BAGAN SINEMBAH	312	1.740	2.052
2	BAGAN SINEMBAH RAYA	503	1.643	2.146
3	BALAI JAYA	2.060	4.410	6.470
4	BANGKO	11	24	35
5	BANGKO PUSAKO	155	615	770
6	BATU HAMPAR	59	178	237
7	KUBU	76	88	164
8	KUBU BABUSSALAM	29	59	88
9	PASIR LIMAU KAPAS	46	164	210
10	PEKAITAN	185	352	537
11	PUJUD	229	1.126	1.355
12	RANTAU KOPAR	51	65	116
13	RIMBA MELINTANG	173	417	590
14	SIMPANG KANAN	746	1.553	2.299
15	SINABOI	26	97	123
16	TANAH PUTIH	226	527	753
17	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	66	159	225
18	TANJUNG MEDAN	1.176	1.178	2.354
	Total	6.129	14.395	20.524

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Sedangkan pada tahun 2018 jumlah populasi ternak khususnya

sapi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berikut ini adalah

jumlah populasi ternak sapi tahun 2018 di Kabupaten Rokan hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018
Populasi Daerah Ternak Sapi Potong Di Setiap Kecamatan :

No	Kecamatan	Jumlah Sapi Betina dan Sapi Jantan
1	BAGAN SINEMBAH	2.571
2	BANGKO	34
3	BANGKO PUSAKO	770
4	BATU HAMPAR	230
5	KUBU	180
6	KUBA	80
7	PASIR LIMAU KAPAS	257
8	PEKAITAN	353
9	PUJUD	1414
10	RANTAU KOPAR	47
11	RIMBA MELINTANG	782
12	SIMPANG KANAN	2127
13	SINABOI	160
14	TANAH PUTIH	752
15	TANJUNG MELAWAN	192
16	BAGAN SINEMBAH RAYA	1403
17	BALAI JAYA	3121
18	TANJUNG MEDAN	3688
Total		18.161

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak di Kabupaten Rokan Hilir Mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi untuk Kecamatan Bagan Sinembah Mengalami peningkatan populasi ternak khususnya sapi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Ternak Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Mengapa Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Ternak Sapi di Kecamatan Bagan Sinembah Belum Optimal?

Dari rumusan masalah pokok di atas dapat di ambil dua pertanyaan spesifik yaitu :

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memahami Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi?

2. Apakah lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Sudah Mendukung?

MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konten kebijakan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mendeskripsikan konteks kebijakan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan mengenai Implementasi Kebijakan Percepatan populasi Ternak Sapi dan Kerbau di Kecamatan Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

2. Manfaat Akademis
 - Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.
 - Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah dalam departemen ilmu politik terutama Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Ternak Sapi Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.
 - Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

KERANGKA TEORITIK

Implementasi Kebijakan

Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation In The World* (1980), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung kepada dua aspek yaitu *Content* dan *Context* nya, dan tingkat keberhasilan tergantung pada kondisi 3 (tiga) komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen ini menyebabkan program nasional menghasilkan variasi *output* dan *outcomes* yang berbeda di daerah. Komponen itu adalah sebagai berikut :

a. Konten Kebijakan (*Conten Of Policy*)

Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang akan dituntut dengan melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dikejar. Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dapat dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementatornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Merille S. Grindle adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan Para Aktor

Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Manfaat Yang Akan di Hasilkan

Pada poin ini kebijakan konten berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan Yang Ingin di Capai

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. Kedudukan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. Sumber-Sumber Daya Yang di Gunakan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. Konteks Kebijakan

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Merrile S. Grindle adalah sebagai berikut :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon

dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Kebijakan akan berjalan lancar apabila para pelaksana kebijakan tersebut merespon dengan baik dan menjalankan suatu kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur. Jadi kerjasama sangat diperlukan antara para pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan lapangan. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Ternak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN POPULASI TERNAK DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang selanjutnya disebut Upsus Siwab adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan.

Penataan kelembagaan peternak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir. Setiap kelembagaan peternak memiliki peluang untuk membentuk dan mengembangkan lembaga peternak, namun demikian kelembagaan peternak harus terbentuk berdasarkan kebutuhan untuk mengembangkan kegiatan usaha. Penyuluh merupakan salah satu ujung tombak pembangunan pertanian yang senantiasa bersama dengan peternak. Para petugas penyuluh lapangan ini berada dalam naungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan kelembagaan peternak terhadap pengembangan swasembada sapi juga melakukan peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan peningkatan kapasitas Sumber daya manusia dan

kelembagaan dilakukan untuk pemerintah, swasta, dan peternak. Pengembangan sumber daya manusia akan di tingkatkan dari aspek ketersediaan dan kapasitasnya melalui berbagai jenis pelatihan teknis dan kewirausahaan.

Kelembagaan pemerintah di tujuan untuk memperkuat pelayanan pemerintah seperti Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pos kesehatan hewan, rumah potong hewan, penyuluhan, unit pelaksana teknis pusat dan daerah. Kelembagaan peternak akan terus di tumbuhkan, terutama penguatan dalam pengembangan swasembada sapi tersebut.

Selain itu juga, Pemerintah kabupaten Rokan Hilir juga membuat beberapa program terkait dengan swasembada sapi ini. Program dan kegiatan ini di buat untuk membantu para kelompok ternak yang ada di kabupaten Rokan Hilir mampu melaksanakan program swasembada sapi berjalan dengan lancar. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap dengan adanya program yang telah dibuat mampu dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terkait baik itu dari pemerintah Kabupaten sampai ke Pemerintah Kecamatan.

Tabel 3.1
Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

No	Program Dan Kegiatan
1	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)
2	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang di distribusikan kepada masyarakat
3	Peningkatan kelembagaan peternak dan kelompok peternak
4	Pelatihan dan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
5	Pembinaan dan pendampingan program SIWAB

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Rokan Hilir

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap dengan berbagai program dan kegiatan yang di buat dapat di laksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan program swasembada sapi ini. Terutama para kelompok ternak agar dapat

mengikuti program dan kegiatan tersebut dengan baik agar apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Jumlah Total IB (Inseminasi Buatan) Tercatat Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Total Program Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2018 di Kabupaten Rokan Hilir

No	Bulan	Jumlah IB (ekor)
1	Januari	65
2	Februari	75
3	Maret	112
4	April	101
5	Mei	146
6	Juni	83
7	Juli	108
8	Agustus	125
9	September	114
10	Oktober	93
11	November	96
12	Desember	55
Total		1117

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

Tabel diatas menunjukkan bahwa Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi di Kabupaten Rokan Hilir dapat berkembang pesat dan hasilnya melebihi target. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir menargetkan 1000 ekor sapi bunting, namun hasilnya bisa mencapai 1117 ekor sapi. Hal ini bisa mendukung memenuhi target

pencapaian swasembada daging nasional yang ditargetkan Pemerintah akan tercapai pada tahun 2026.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang di pengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana

kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat di ketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Kelembagaan yang sangat perlu untuk mendukung pembangunan peternakan sebagai penentu kebijakan dan penataan pelaksanaannya yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan, anatara lain

a. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai Pembina, pengawas, peneliti dan pelaksana pendidikan, pelatihan serta penyuluhan, yang perlu tersedia pada tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

b. KelembagaanPeternak/Kelompok Peternak

Pada umumnya kelompok peternak belum dimanfaatkan secara optimal oleh peternak sehingga belum berfungsi optimal sebagai wadah belajar mengajar, unit produksi, wahana kerjasama antar anggota dan antar kelompok serta dengan pengusaha yang bergerak dibidang peternakan. Kelompok peternak belum melembaga dengan koperasi/unit usaha, sehingga belum dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan upaya mendapatkan modal untuk meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan kontak peternak andalan yang lebih intensip sampai menjadi kelompok peternak mandiri.

Menurutnya selain pasar ternaknya yang harus jelas, kelembagaan pengembangan integrasi usaha tani dan ternak juga perlu diadakan. Baik kelembagaan yang memayungi usaha integrasi tersebut, maupun kelembagaan di petaninya. Untuk kelembagaan yang memayungi integrasi bisa dikembangkan pola kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta dan petani. “ Ternaknya bisa dari swasta atau pemerintah yang diberikan kepada petani sebagai kredit.

Pemerintah daerah bisa berperan sebagai koordinator, “fasilitator” (pelayan), “regulator” (pengatur), “dinamisator” (penggerak) dan pengendali dimasing-masing wilayah kerja administratif (Propinsi, Kabupaten dan Kota) sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan petani/peternak atau kelompok tani ternak berperan sebagai pelaku usaha peternakannya. “para petani/peternak atau kelompok tani ternak ini mungkin belum berkoperasi, sehingga pengelolaan usaha ternaknya bisa lebih efisien dan ekonomis.

c. Kelembagaan Pasar

Dalam hal ini peran pemerintah penting untuk menciptakan kelembagaan pasar, agar peternak tidak tertekan oleh bentuk pasar yang sifatnya monopoli dan monopsoni terutama yang dilakukan oleh para tengkulak atau blantik.Kelembagaan pasar yang diperlukan antara lain sarana pemasaran (pasar hewan) yang memadai dan mudah dijangkau serta tersedianya system informasi pasar.

d. Kelembagaan Penyuluhan dan Penelitian Peternakan

Berkembangnya teknologi secara pesat mulai proses produksi, panen, pasca panen (kualitas produk) sampai pemasaran memerlukan sinergi kelembagaan penyuluhan dan penelitian peternakan. Kemitraan/ kerjasama antara peternak dengan kelembagaan penyuluhan dan penelitian perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa Bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Ternak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 belum optimal. Ini terbukti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan nya Implementasi Kebijakan Percepatan Populasi Sapi di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Bagan Sinembah memang belum berjalan dengan baik. Karena swasembada sapi ini baru berjalan 1 sampai 2 tahun jadi belum adanya evaluasi dari pemerintah apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam swasembada sapi ini.
2. Kabupaten Rokan Hilir masih kurang Sumber Daya manusia yaitu kurangnya dokter hewan. Dengan populasi ternak di Rokan Hilir sekitar 20.000 ekor

Kabupaten Rokan Hilir hanya mempunyai 7 orang dokter hewan, yang mana ini belum sepadan dengan populasi ternak. Kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai Pembina, pengawas, peneliti dan pelaksana pendidikan, pelatihan serta penyuluhan belum berfungsi dengan baik dalam menata kelembagaan peternak terhadap pengembangan swasembada sapi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Rahmatika Creative Design
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Creswell W. John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Grindle, S. Merilee. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey : Princeton University Press
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Suharto Edi, Ph.D.2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Wibawa, Samodra.2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

INTERNET

<http://www.Halloriau.com> (di akses pada tanggal 13 desember 2017, pukul 16:40)

<http://www.pesisirnews.com> (di akses pada tanggal 13 desember 2017, pukul 16:38)

[http://www.Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.com](http://www.PemerintahKabupatenRokanHilir.com) (di akses pada tanggal 12 desember 2017, pukul 10:31)

JURNAL

Iskandar Adi Nuhung. 2015. Kinerja, Kendala, dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi : Vol.33 No.1

Rasali H. Matondang, S. Rusdiana. 2013. Langkah-Langkah Strategi Dalam Mencapai Swasembada Daging sapi/Kerbau : Vol. 32 No. 3

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014